



Australian Government



Kajian Indeks Demokrasi: Penelusuran Teoritis dan Perbandingan antar Indeks Demokrasi

Rabu, 4 Juli 2018

Latar belakang dan fokus kajian

- *Background Study* Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas bekerjasama dengan Cakra Wikara Indonesia, The SMERU Research Institute, dan PUSAD Paramadina.
- Studi akan akan memfokuskan kajian pada proses penguatan lima aspek, yaitu:

Kerangka Teori dan
Konseptual
Demokrasi

Operasionalisasi
Konsep : Dimensi,
Variabel, dan
Indikator

Metode
Pengukuran

Metode
Pengumpulan Data

Pemanfaatan dan
Sosialisasi melalui
Database IDI

Tujuan dan hasil yang diharapkan

Tujuan

- Mengkaji dan memetakan kerangka teori dan literatur terkait demokrasi yang mencakup berbagai dimensi politik, sosial, dan ekonomi
- Melakukan komparasi atas berbagai indeks demokrasi yang ada dengan berbagai paradigma, pendekatan, dan metodologi yang mencakup operasionalisasi konsep dan pengukuran
- Melakukan kajian terkait aspek pengumpulan data dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
- Merumuskan alternatif/rekomendasi untuk penyesuaian terhadap IDI

Hasil

Rekomendasi untuk penguatan IDI yang mencakup :

1. Landasan teori
2. Penyertaan dimensi ekonomi dalam operasionalisasi konsep
3. Metode pengukuran dan cakupan wilayah/unit analisis
4. Aspek pengumpulan data
5. Kegunaan IDI dalam perencanaan dan penganggaran.

Alur dan tahapan kerja

Fase 1: Studi Literatur

Penelusuran Filosofis dan Teori

Perbandingan Indeks-indeks Demokrasi

FGD Ahli :
4 Juli 2018

Fase 2: Operasionalisasi konsep & Instrumen

Finalisasi Teori, operasionalisasi konsep dan Metode

Penyusunan instrumen

FGD Ahli :
3 September

Fase 3: Pilot test dan studi lapangan

Nasional-Pusat
(Minggu Pertama September)

Sumatera Barat
(Minggu Kedua September)

Maluku (Minggu Ketiga September)

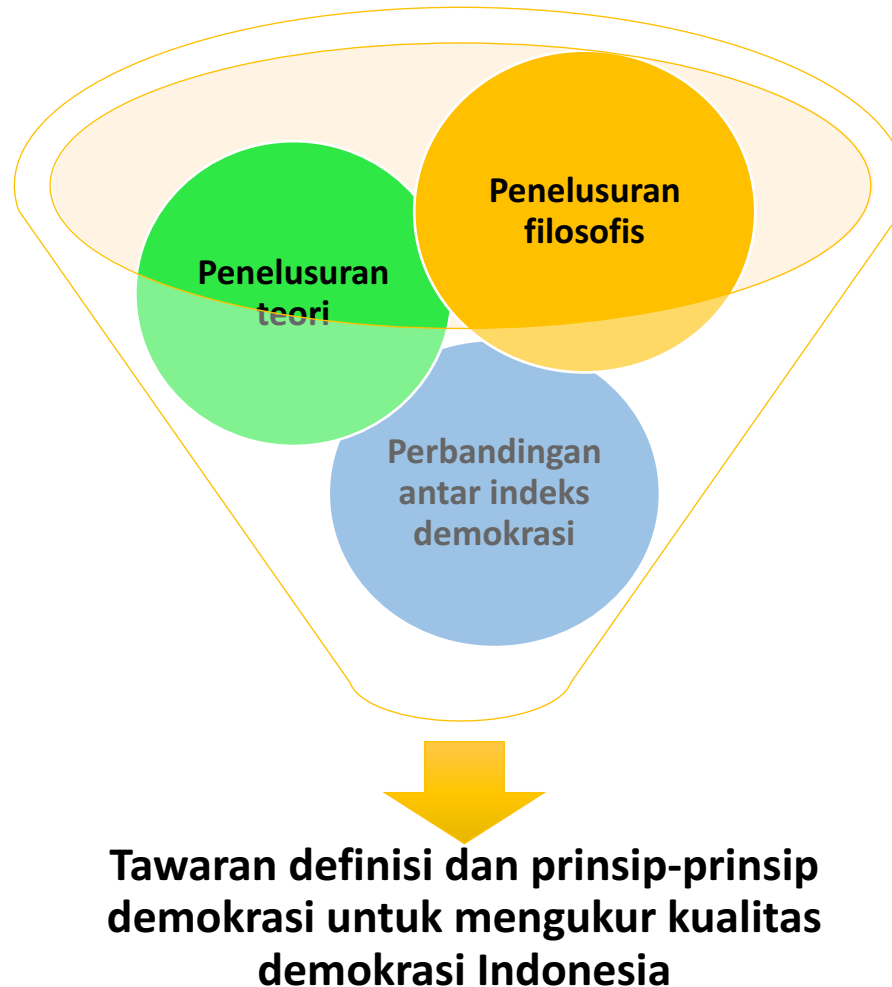
FGD Ahli : 29
Oktober 2018

Fase 4 : Penulisan Laporan Kajian

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Rekomendasi

Presentasi Hasil :
3 Desember 2018

Fase 1: Studi literatur



Pembabakan presentasi

1. Penelusuran filosofis
2. Pemetaan teori demokrasi
3. Perbandingan antar indeks demokrasi
4. Tantangan dan masalah demokrasi di indonesia
5. Tawaran definisi dan prinsip-prinsip demokrasi dalam upaya mengukur kualitas demokrasi

1. Penelusuran filosofis

Penelusuran filosofis

Demokrasi Athena
(Aristoteles,
Tuchydides)

Demokrasi
Republikan (Cicero,
Machiavelli)

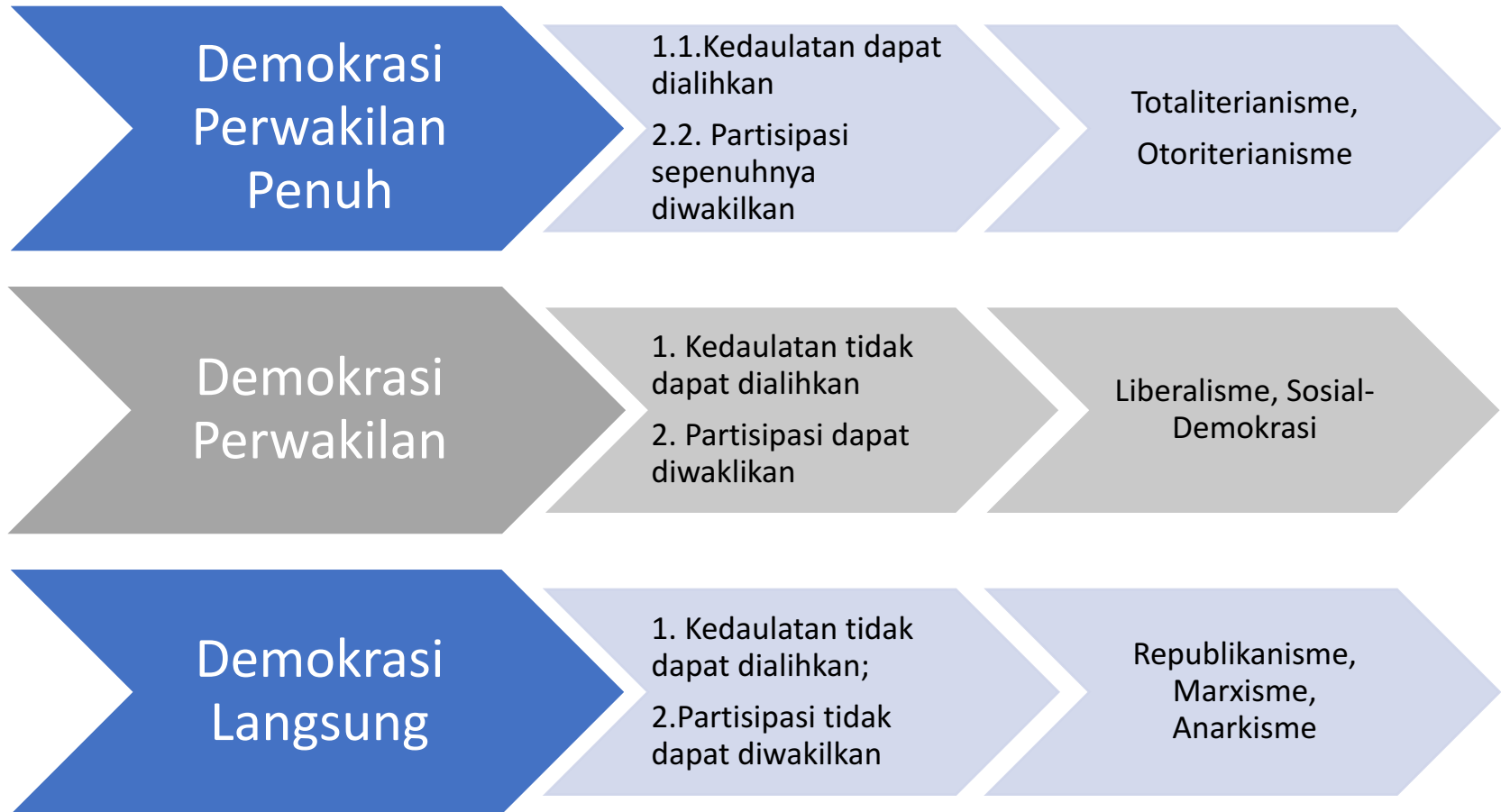
Demokrasi
Perwakilan Penuh
(Hobbes)

Demokrasi
Perwakilan (Locke)

Demokrasi
Langsung
(Rousseau)

Demokrasi Perwakilan Penuh (Hobbes)	Demokrasi Perwakilan (Locke)	Demokrasi Langsung (Rousseau)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaulatan dapat dialihkan 2. Partisipasi dapat diwakilkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaulatan tidak dapat dialihkan 2. Partisipasi dapat diwakilkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaulatan tidak dapat dialihkan; 2. Partisipasi tidak dapat diwakilkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Individu haruslah memiliki keinginan untuk menyerahkan hak-hak mereka dalam mengatur-diri (<i>self-government</i>) kepada satu otoritas yang memiliki kekuasaan penuh, yang berwenang melakukan tindakan atas nama mereka. 2. Hobbes lebih mementingkan pada perlindungan-diri manusia sebagai tujuan utama, dan masyarakat harus diatur untuk mencegah hasrat kekerasan dalam diri manusia, dan memandang perlunya konsentrasi kekuasaan hanya pada satu tempat, yang ia sebut <i>the Sovereign</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan; 2. Keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemampuan dan kemauan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu. 3. Susunan aparat pemerintah bukan merupakan pemindahan seluruh hak-hak subyek kepada domain politik. 4. Kedaulatan individu: "<i>life, liberty and estate</i>" (kehidupan, kebebasan dan hak milik). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebebasan dan otonomi kolektif yang hanya dapat dihidupkan dalam sistem pemerintahan-kolektif mandiri (<i>collective self-rule</i>). 2. Individu yang bermasyarakat menciptakan hukumnya sendiri, dan kemudian mengatur hidupnya secara kolektif 3. Individu tunduk pada hukum, bukan pada individu lain. Hukum haruslah dibuat oleh seluruh warga secara kolektif.

Perkembangan teoritik



2. Pemetaan teori demokrasi

Pemetaan Proposisi Utama dalam Teori Demokrasi

Periode	Proposisi Utama	Teoritisi
1960-1970-an	Demokrasi perwakilan ditopang oleh pemilu demokratis; Institusi demokratik yang kuat; Persebaran kekuasaan; partisipasi politik warga yang efektif; Partisipasi demokratis didominasi oleh para elit	Leslie Lipson; Robert Dahl; Pateman
1980-1990-an	Partisipasi warga; Deliberasi; Persebaran dan perimbangan kekuasaan; Kebebasan politik dan kedaulatan warga; Inklusi dan demokrasi; Politik perbedaan (demokrasi plural-kultural)	Jurgen Habermas; Robert Putnam; Dietrich Rueschemeyer; Kenneth Bollen; Iris Marion Young
2000-an	Demokrasi lintas batas negara (lokal dan global); Kebebasan dan hak sipil; Masyarakat multikultural; Partisipasi warga, Inklusifitas dan kesetaraan antar kelompok warga; Perimbangan kekuasaan dan demonopolisasi sumber daya kekuasaan; Demokrasi sebagai ruang kontestasi; Demokrasi deliberatif; Paradoks demokrasi	David Held; David Beetham; Arend Lijphart; Charles Tilly; Stein Ringen; Hee Yeon Cho; Mouffe

Pemetaan Prinsip Utama dalam Teori Demokrasi

Teoritis	Prinsip Utama					
	Kebebasan	Kedaulatan	Kesetaraan	Partisipasi	Keterwakilan	Kapabilitas Negara
Dahl	√		√	√	√	
Tilly	√	√	√	√	√	√
Bollen	√	√		√	√	
Habermas	√	√	√	√		
Putnam			√	√		√
Cho	√		√	√	√	
Young	√		√	√	√	
Mouffe	√		√	√		

3. Perbandingan antar indeks demokrasi

Perbandingan berbagai indeks demokrasi

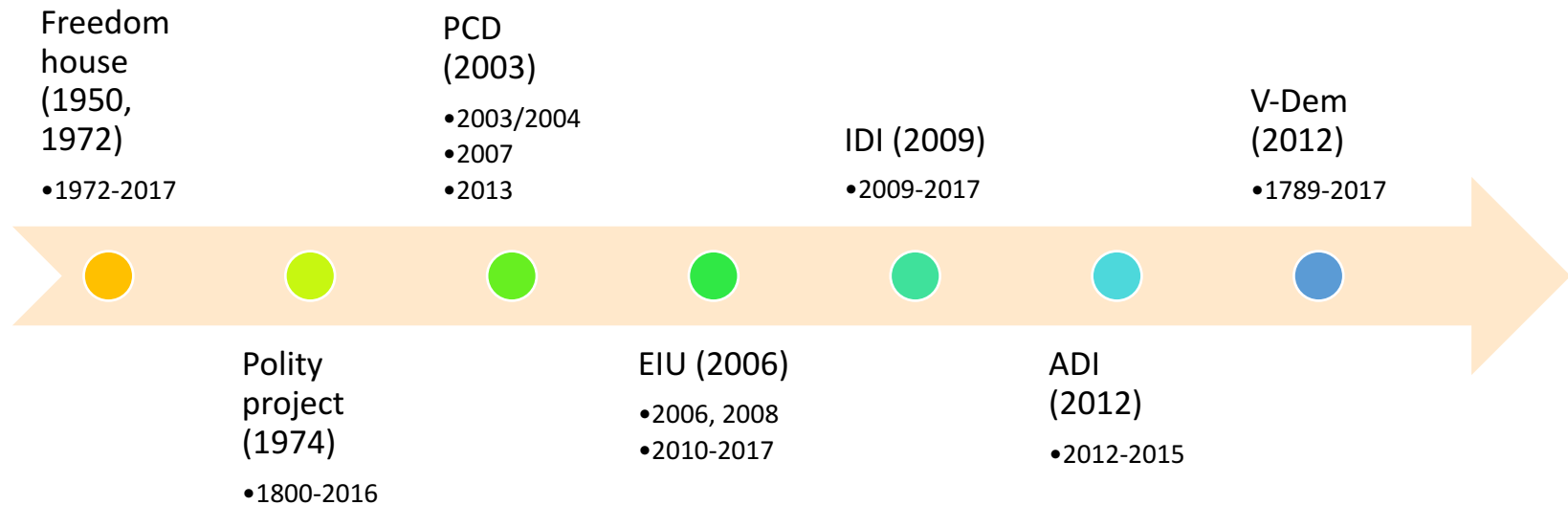
1. The Economist Intelligence Unit (EIU) Democracy index
2. Asian Democracy Index (ADI)
3. Freedom in the World (Freedom House)
4. Polity project (Polity IV)
5. Varieties of Democracy (V-Dem)
6. Assessment on the state of democracy in Indonesia: Demos, UGM , UiO (PCD)
7. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Poin perbandingan:

1. Waktu
2. Ruang lingkup dan perubahan
3. Operasionalisasi Konsep Demokrasi
4. Sumber dan metode pengumpulan data

Poin 1. Waktu

- Periode pengukuran survey dan interval pelaksanaan



Tahunan

- V-Dem
- Polity
- Freedom house
- EIU
- IDI

Periodik

- ADI: setiap tahun antara 2012-2015, selanjutnya direncanakan per dua tahun.

Eventual

- PCD: menjelang pemilu

Poin 2. Ruang lingkup dan perubahan

Nasional / regional / internasional



PCD

- Indonesia
- Survei 1,2,3

ADI

- 6 negara Asia
- jumlah informan (54→27) dan kategori sampel (posisi→spektrum)

EIU

- 167 negara
 - Freedom house
- 195 negara

Polity Project

- 162 negara
- I (1974), II (1986), III (mid 1990-an), IV (2006)

V-Dem

- 201 negara



Provinsi

PCD

- Survei 1: 31 provinsi
- Survei 2: 33 provinsi
- Survei 3: n/a
- kuesioner, indikator dan metode analisis

IDI

- 34 provinsi
- Revisi (2) indikator untuk variabel "Peran Birokrasi Pemerintah Daerah"

Indeks yang membandingkan antar negara, umumnya melakukan pembaharuan data setiap tahun



Kabupaten/kota

PCD

- Survei 1 dan 2: n/a
- Survei 3: 30 kab/kota

ADI

- 4 kab/kota oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Poin 3. 1. Frase Kunci Konsep Demokrasi antar Indeks

Periode	Proposisi Utama	Teoritis	Indeks	Frase kunci
1960-1970-an	Demokrasi perwakilan ditopang oleh pemilu demokratis; Institusi demokratik yang kuat; Persebaran kekuasaan; partisipasi politik warga yang efektif; partisipasi demokratis didominasi oleh para elit	Lipson; Dahl; Pateman	Freedom (1950,1972)	Deklarasi Universal HAM berlaku di seluruh negara, kebebasan, demokrasi liberal,
			Polity project (1974)	Sistem pemerintahan demokratis atau otokrasi, keberadaan institusi dan prosedur, batasan untuk eksekutif secara institusional, jaminan terhadap kebebasan sipil
1980-1990-an	Partisipasi warga; Deliberasi; Persebaran dan perimbangan kekuasaan; Kebebasan politik dan kedaulatan warga; inklusi dan demokrasi, politik perbedaan (<i>politics of difference</i>)	Habermas; Putnam; Rueschemeyer; Bollen; Young		
2000-an	Demokrasi lintas batas negara (lokal dan global); Kebebasan dan hak sipil; Masyarakat multikultural; Partisipasi warga, Inklusifitas dan kesetaraan antar kelompok warga; perimbangan kekuasaan dan demonopolisasi sumberdaya kekuasaan; demokrasi deliberatif, paradoks demokrasi	Held; Beetham; Lijphart; Tilly; Ringen; Cho; Mouffe	PCD (2003)	Kontrol rakyat, kesetaraan politik
			EIU (2006)	Kekuasaan mayoritas, pemilu, perlindungan hak minoritas, penghormatan terhadap prinsip dasar HAM
			IDI (2009)	Kebebasan, aturan hukum, kepentingan publik
			ADI (2012)	De-monopolisasi sumber daya politik, sosial, dan ekonomi
			V-Dem (2012)	Pemerintahan oleh rakyat

Poin 3. 2. Operasionalisasi Konsep Demokrasi antar Indeks

Indeks Demokrasi	Operasionalisasi Konsep Demokrasi
IDI	<ul style="list-style-type: none">(1) Kebebasan Sipil,(2) Hak-hak Politik(3) Lembaga Demokrasi
Freedom in the World	<ul style="list-style-type: none">(1) Hak-hak Politik(2) Kebebasan Sipil
Polity IV	<ul style="list-style-type: none">(1) Daya saing rekrutmen eksekutif(2) Keterbukaan dalam rekrutmen eksekutif(3) Batasan untuk kepala eksekutif(4) Peraturan untuk rekrutmen kepala eksekutif(5) Daya saing partisipasi politik(6) Peraturan untuk partisipasi politik
PCD	<ul style="list-style-type: none">(1) Basis pembentukan demos dan urusan publik(2) Institusi (aturan dan regulasi) demokrasi(3) Peran aktor utama dalam urusan publik(4) Relasi aktor terhadap aturan dan regulasi demokrasi(5) Kapasitas politik para aktor utama(6) Strategi (dinamika) demokratisasi

Poin 3. 2. Operasionalisasi Konsep Demokrasi antar Indeks

Indeks Demokrasi	Operasionalisasi Konsep Demokrasi
EIU	(1) Proses Pemilu & Pluralisme (2) Kebebasan Sipil (3) Partisipasi Politik (4) Fungsi Pemerintah (5) Budaya Politik Demokratis
ADI	(1) Liberalisasi (2) Ekualisasi
V-Dem	(1) Pemilu (2) Liberal (3) Partisipasi (4) Deliberatif (5) Kesetaraan (6) <i>Mayoritas</i> (7) <i>Konsensus</i>

Frase Kunci dari Operasionalisasi Konsep Demokrasi antar Indeks



Poin 4. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber & Metode Pengumpulan Data	IDI	EIU	ADI	Freedom	Polity IV	V-Dem	PCD
1. Pengodean / review (surat kabar, dokumen, laporan, publikasi akademik, dsb)	✓			✓	✓	✓	
2. Data observasional	✓					✓	
3. FGD	✓						✓
4. Wawancara mendalam	✓						
5. Penilaian panel ahli	✓	✓		✓	✓	✓	
6. Survei ahli			✓			✓	✓
7. Survei opini publik		✓					
8. Ukuran komposit (dari indeks / dataset lain)		✓				✓	

4. Tantangan dan masalah demokrasi di Indonesia

Masalah demokrasi di Indonesia (1)

Akademisi	Masalah Demokrasi Indonesia	
	Nasional	Lokal
Richard Robison-Vedi Hadiz	<ul style="list-style-type: none">• Oligark yang dibesarkan rezim orde baru berhasil melakukan reorganisasi kekuatan ekonomi dan politik.• Demokrasi elektoral dan insitusi demokratik menjadi arena baru bagi para oligark dan koalisinya.	
Jeffrey Winters	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat sipil terfragmentasi dan tidak terorganisir• Sistem demokrasi elektoral pasca pemerintahan Soeharto dibajak oleh oligark dan menjadi arena untuk memperjuangkan kepentingan perorangan dan kolektif mereka.• Kegagalan penegakan hukum untuk melemahkan oligark	

Masalah demokrasi di Indonesia (2)

Akademisi	Masalah Demokrasi Indonesia	
	Nasional	Lokal
Edward Aspinall-Greg Feally (<i>ed</i>)		Desentralisasi tidak diikuti dengan demokratisasi, karena elite lokal yang dibesarkan pada era orde baru berhasil beradaptasi, berkoalisi dengan aktor baru dan muncul sebagai pemain penting dalam politik lokal.
Marco Bunte-Andreas Ufen (<i>ed</i>)	Transisi Demokrasi Indonesia berjalan dalam jangka waktu yang panjang namun tanpa arah yang jelas menuju penguatan, pendalaman dan konsolidasi demokrasi.	

Konteks dan tantangan demokrasi di Indonesia

- **Reorganisasi Elite Lama:** Elite lama yang dibesarkan oleh rezim orde baru mampu bertahan pada masa transisi dan mampu menyusun ulang kekuatan politik-ekonomi.
- **Pembajakan Demokrasi Elektoral:** Transisi Demokratik terjadi sebatas pembentukan institusi demokratik dan pelaksanaan demokrasi elektoral. Demokrasi elektoral dan desentralisasi menjadi arena baru bagi elite lama dan elite baru untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingannya.
- **Ketimpangan ekonomi:** Ketimpangan akses sumberdaya ekonomi dan pemusatan kekayaan pada elite yang mendorong mereka untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dengan beragam cara termasuk terlibat dalam kegiatan politik.
- **Masyarakat Sipil Terfragmentasi:** Tidak terkonsolidasinya berbagai isu dan agenda masyarakat sipil.

(Robison-Hadiz 2004; Winters 2011, Aspinall-Fealy 2003; Bunte-Ufen 2009)

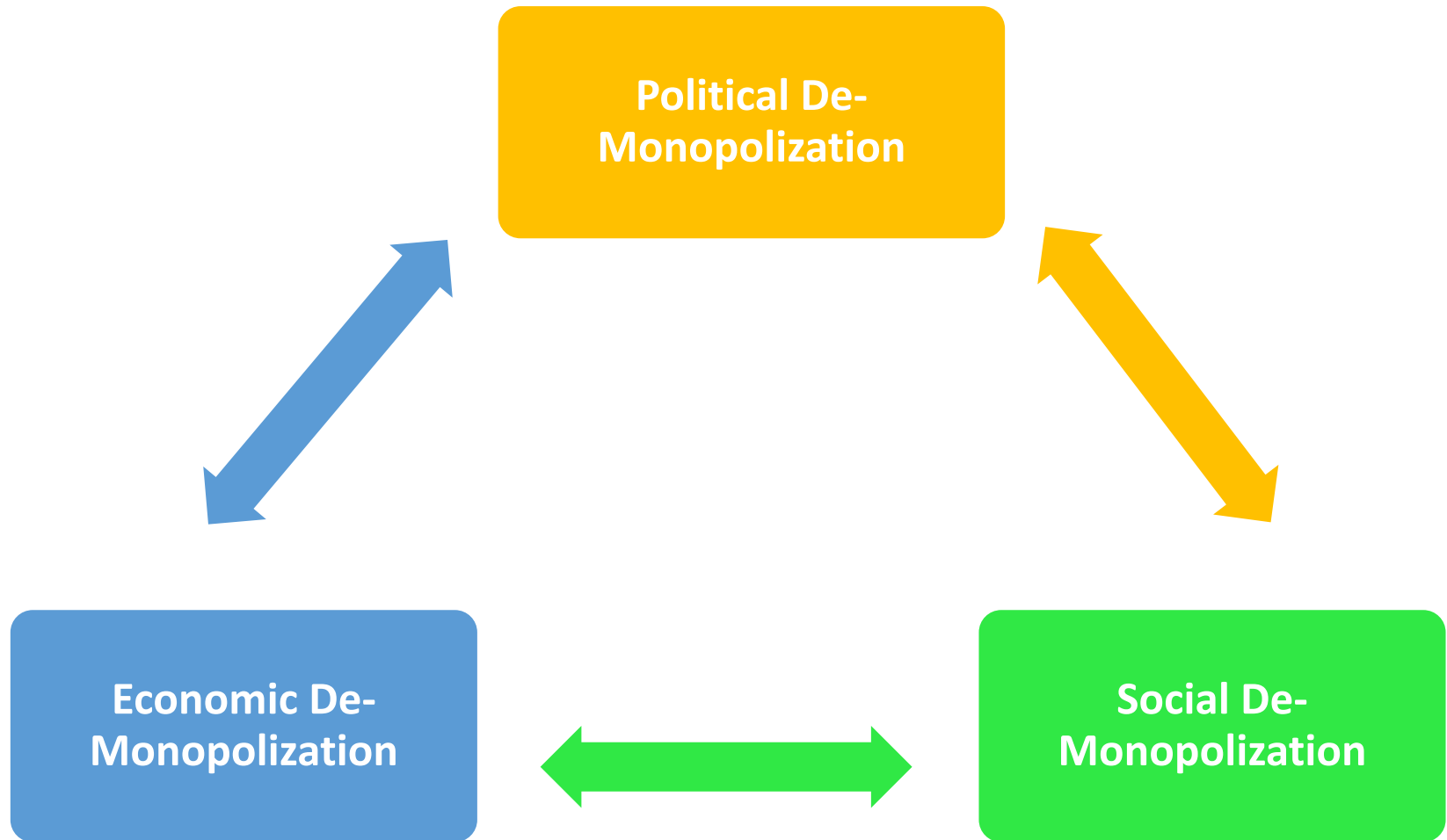
5. Tawaran definisi dan prinsip-prinsip demokrasi dalam upaya mengukur kualitas demokrasi

Definisi demokrasi

- Demokrasi berdasarkan tantangan dan masalah di Indonesia dimaknai sebagai upaya penyebaran kekuasaan (*power dispersion*) untuk mencegah konsentrasi sumber kekuasaan pada sekelompok elite.
- Penyebaran kekuasaan harus berjalan di tiga ranah: politik, ekonomi dan masyarakat sipil.

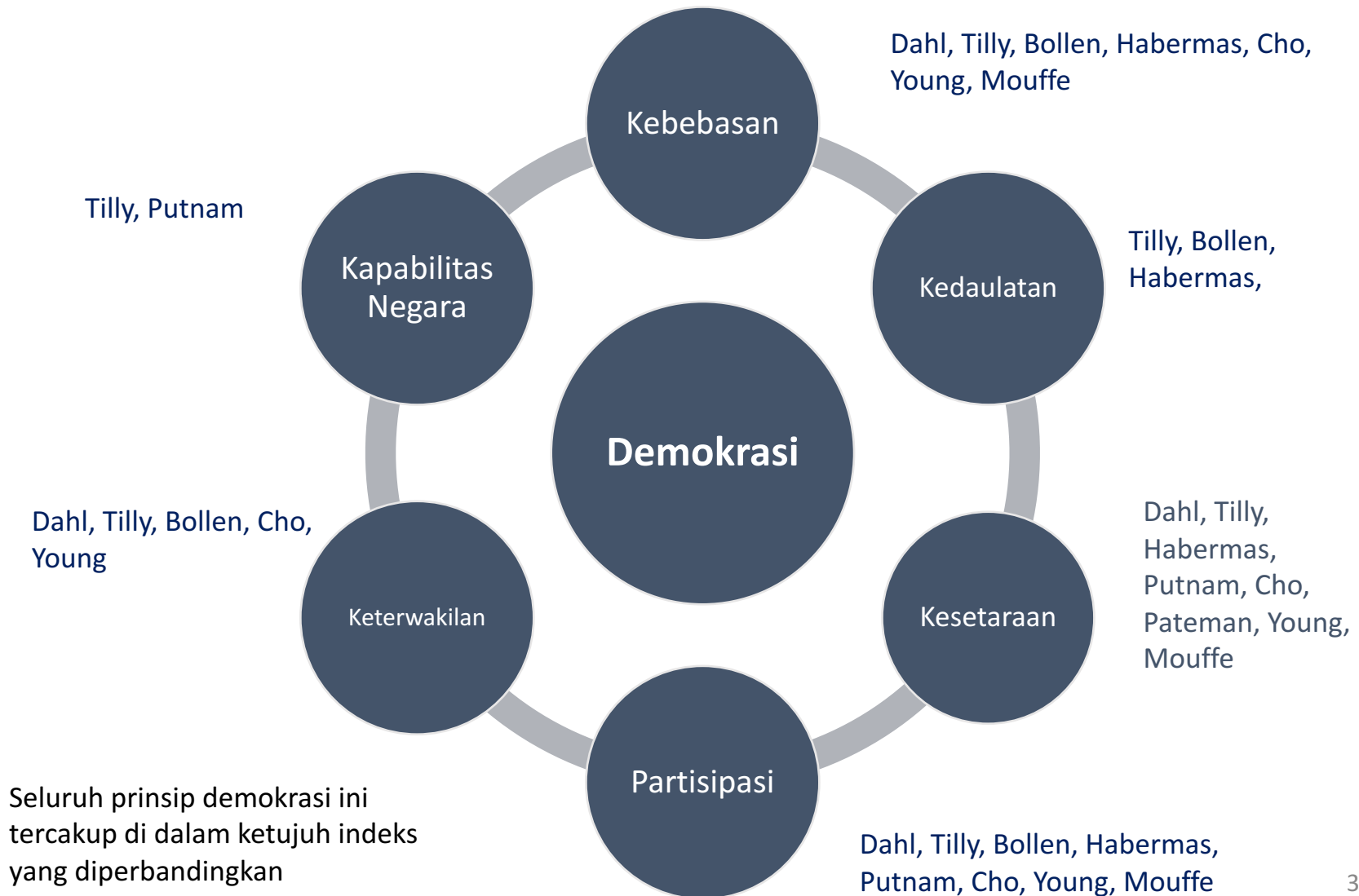
(Dahl 1971; Bollen 1980; Cho 2012)

Tiga arena perimbangan kekuasaan

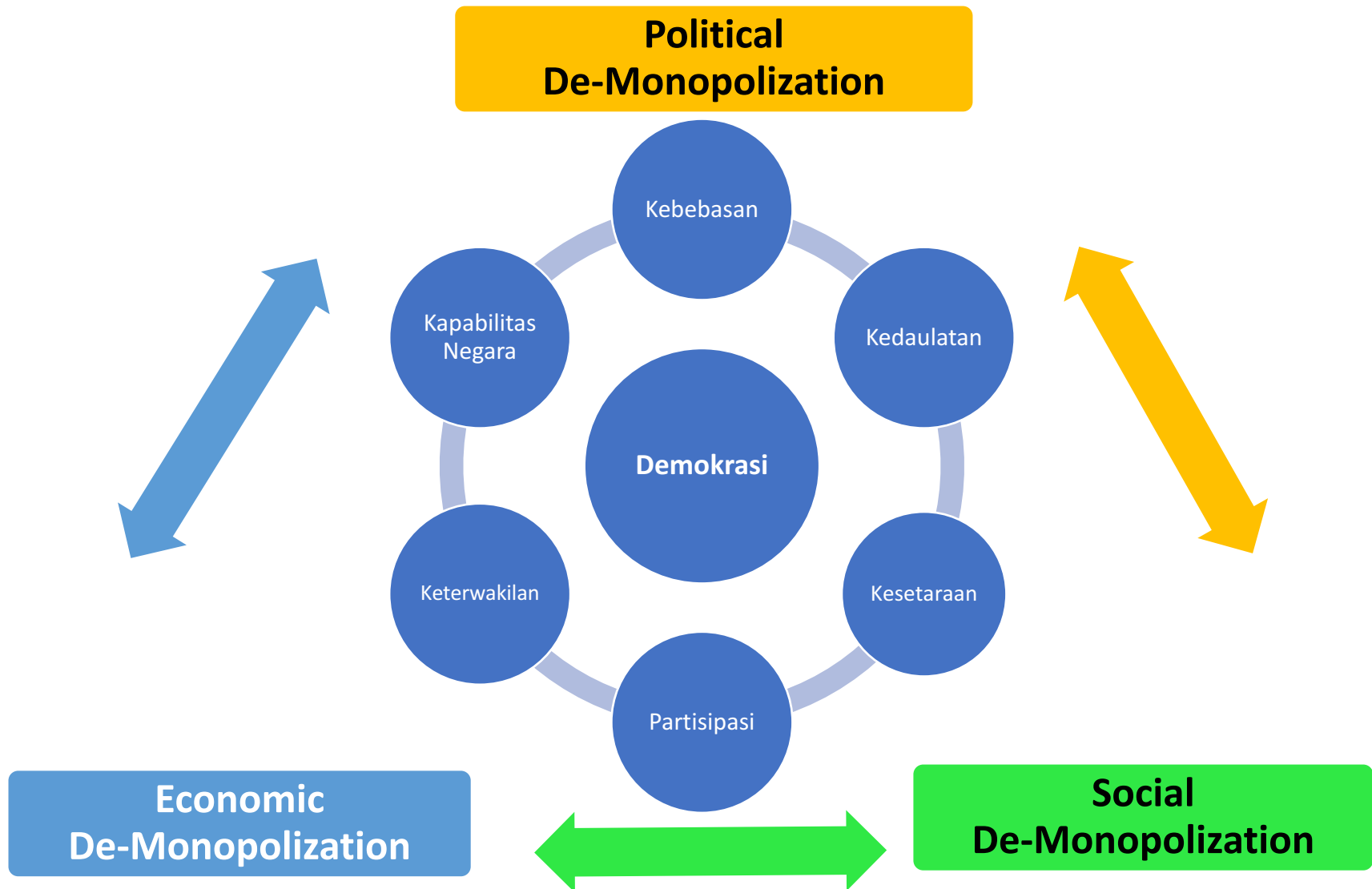


Hee Yeon Cho (2012)

Enam prinsip demokrasi



Sintesis dan operasionalisasi konsep



Perbandingan prinsip yang ditawarkan dengan aspek IDI (1)

Prinsip yang ditawarkan	Aspek IDI	Proksi (variable) IDI	Simulasi operasionalisasi di tiga ranah
Kebebasan	Kebebasan sipil	<ul style="list-style-type: none"> Kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan 	<p>Politik: Kemudahan mendirikan partai politik; kemudahan berkontestasi dalam pemilu; Kebebasan berkumpul, berorganisasi; Bebas beroposisi terhadap pemerintah.</p> <p>Ekonomi: Kebebasan untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak; Jaminan hak pekerja</p> <p>Masyarakat sipil: Kebebasan berkespresi ;kebebasan menyatakan pendapat; CSO bebas dari intervensi pemerintah</p>
Kedaulatan	Kebebasan sipil	<ul style="list-style-type: none"> Kebebasan dari diskriminasi 	<p>Politik: bebas dari kekerasan aparat, Bebas dari penangkapan dan penahanan atas pilihan dan sikap politik.</p> <p>Ekonomi: Bebas dari eksploitasi dalam relasi kerja; tidak mempekerjakan anak; pemberangusan serikat pekerja; Independensi dari modal asing</p> <p>Masyarakat sipil: Bebas dari persekusi dan ancaman dari kelompok warga lain; Keberadaan CSO yang membela kepentingan masyarakat yang mendapat ancaman</p>

Perbandingan prinsip yang ditawarkan dengan aspek IDI (2)

Prinsip yang ditawarkan	Aspek IDI	Proksi (variabel) IDI	Simulasi operasionalisasi di tiga ranah
Kesetaraan	Hak-hak politik	<ul style="list-style-type: none"> Hak memilih dan dipilih 	<p>Politik: representasi kelompok-kelompok sosial di parlemen; perimbangan kekuasaan di parlemen</p> <p>Ekonomi: kesenjangan ekonomi antar wilayah; Kesenjangan asset ; Kesetaraan hak pekerja laki-laki dan perempuan (upah dan fasilitas kerja)</p> <p>Masyarakat sipil: Keragaman CSO dalam menjawab kebutuhan masyarakat; tindakan afirmatif CSO terhadap kelompok rentan minoritas</p>
Partisipasi	Hak-hak politik	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan 	<p>Politik: Jaminan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu; Jaminan partisipasi politik warga negara</p> <p>Ekonomi: Keikutsertaan dalam jaminan sosial / asuransi; Hak untuk mendirikan serikat pekerja; keterorganisasian serikat pekerja</p> <p>Masyarakat sipil: berdemonstrasi, menyampaikan petisi; Objektivitas media; akses terhadap kegiatan dan fasilitas kebudayaan</p>

Perbandingan prinsip yang ditawarkan dengan aspek IDI (3)

Prinsip yang ditawarkan	Aspek IDI	Proksi (variabel) IDI	Simulasi operasionalisasi di tiga ranah
Keterwakilan	Hak-hak politik Kelembagaan Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Hak memilih dan dipilih Pemilihan umum yang bebas dan adil 	<p>Politik: Afirmasi untuk keterwakilan perempuan, kelompok minoritas dan marjinal dalam partai politik, parlemen, birokrasi dan penyelenggara pemilu.</p> <p>Ekonomi: Jaminan bebas dari diskriminasi (SARA) dalam rekrutmen pekerja; bebas dari diskriminasi relasi kerja; Perlindungan kelompok miskin</p> <p>Masyarakat Sipil: distribusi kekuasaan dalam kelompok di masyarakat; keterlibatan kelompok sosial dalam forum pengambilan keputusan</p>
Kapabilitas Negara	Kelembagaan demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Peran partai politik Peran DPRD Peran birokrasi pemerintahan daerah, dan Peradilan yang independen Pengawasan terhadap partai politik, eksekutif, legislatif, yudikatif 	<p>Politik: Penerapan <i>Open government data</i>; anti korupsi; supremasi hukum; Check and balance antar instansi pemerintah; Kepercayaan publik pada negara</p> <p>Ekonomi: Kemudahan perizinan berusaha, anti monopoli, kesesuaian upah minimum regional dengan komponen hidup layak; keterbukaan anggaran</p> <p>Masyarakat sipil: Kapabilitas negara untuk menjamin warga bebas dari persekusi, kriminalisasi dan diskriminasi, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam forum-forum untuk mengambil keputusan.</p>

Kepustakaan rujukan (1)

- Aristotle (1981). *The Politics*. Harmondsworth: Penguin.
- Aspinall, Edward & Greg Fealy (Eds). (2003). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Beetham, David (2006). *Democracy: A Beginner's Guide*. Oxford: Oneworld Publications.
- Beetham, David (2004). "Freedom As the Foundation". *Journal of Democracy*, Vol. 15 (4), pp. 61-75.
- Bollen, Kenneth A. (1980). "Issues in the Comparative Measurement of Political Democracy". *American Sociological Review*, Vol. 45, No. 3, pp. 370-390.
- Bollen, Kenneth A. (1986). "Political Rights and Political Liberty in Nations: An Evaluation of Human Rights Measures, 1950 to 1984". *Human Rights Quarterly* Vol 8 No 4 November, 1986, pp 567-591.
- Bollen Kenneth A. (1990). "Political Democracy: Conceptual and Measurement Traps". *Studies in Comparative International Development*, Vol. 25, no. 1, pp 7-24.
- Bunte, Marco & Andreas Ufen (ed). (2009). *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. Oxon: Routledge

Kepustakaan rujukan (2)

- Cho, Hee Yeon (2012). "Democratization as De-monopolization and Its Different Trajectories: No Democratic Consolidation without De-monopolization". *Asian Democracy Review*, Vol 1, pp 4-35.
- Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen, C. H., Lindberg, S. I., Skaaning, S.-E., Teorell, J., ... Wilson, S. (2018). *V-Dem Methodology v8*. Varieties of Democracy (v-Dem) Project. Retrieved from https://www.v-dem.net/media/filer_public/5a/f1/5af198e9-f3e8-4619-b9fd-a8387fdc22a5/v-dem_methodology_v8.pdf
- Coppedge, M., Gerring, J., Lindberg, S. I., Skaaning, S.-E., & Teorell, J. (2017). V-Dem Comparisons and Contrasts with Other Measurement Projects. *SSRN Electronic Journal*, (April). <http://doi.org/10.2139/ssrn.2951014>
- Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, Robert A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, Robert A. (1956). *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Habermas, Jürgen (1998). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.

Kepustakaan rujukan (3)

- Habermas, Jürgen (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to A Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Held, David (2000). *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Hobbes, Thomas (1996). *Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power of A Common-wealth Ecclesiasticall and Civill*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lijphart, Arend (2008). *Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*. London: Routledge, 2008.
- Lipson, Leslie (1964). *The Democratic Civilization*. New York: Ferrer and Simon.
- Locke, John (1963). *Two Treaties of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McCormick, John P. (2011). *Machiavellian Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mouffe, Chantal (2000). *The Democratic Paradox*. NY: Verso Books.
- Mouffe, Chantal (2013). *Agonistics: Thinking The World Politically*. London: Verso.
- Pateman, Carole. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Putnam, Robert D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, New jersey: Princeton University Press

Kepustakaan rujukan (4)

- Ringen, Stein (2010). *The Measurement of Democracy: Towards A New Paradigm*. Symposium: Measuring Democracy. New York: Springer.
- Rueschemeyer, Dietrich, Evelyn Huber & John Stephens. (1997) “The Paradoxes of Contemporary Democracy: Formal, Participatory and Social Dimension”. *Comparative Politics*, Vol. 29, No. 3, Transitions to Democracy: A Special Issue in Memory of Dankwart A. Rustow, pp 323-342.
- Robison, Richard & Vedi Hadiz. (2004). *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Rousseau, Jean-Jacques (1968). *The Social Contract*. Harmondsworth: Penguin.
- Tilly, Charles (2007). *Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Winters, Jeffrey (2011). *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press.
- Young, Iris Marion (1990). *Justice and the Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press.
- Young, Iris Marion (2000). *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press
- The Economist Intelligence Unit. (2018). *Democracy Index 2017: Free speech under attack*. *The Economist*. The Economist Intelligence Unit Limited. Retrieved from http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy_Index_2017.pdf



TERIMA KASIH